

Orang Patut: Konstruksi Identitas dan Kekuasaan dalam Kepemimpinan Melayu Tradisional

Elmustian¹

El Firdausia Yahfis²

Nazhifa Fadila³

¹²³ Universitas Riau, Indonesia

¹ elmustian@lecturer.unri.ac.id

² el.firdausia6057@grad.unri.ac.id

³ nazhifa.fadila6275@grad.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep orang patut dalam masyarakat Melayu yang berfokus pada pembentukan hierarki sosial dan kepemimpinan. Data dalam penelitian ini berupa teks klasik *Tunjuk Ajar Melayu* tentang konsep kepemimpinan, moralitas, dan legitimasi kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Orang Patut* dipahami sebagai figur yang dihormati karena keluhuran budi, kebijaksanaan, kemampuan menimbang persoalan, serta pemahaman yang baik terhadap adat dan agama. *Orang Patut* berfungsi sebagai modal simbolik yang menjaga harmoni antara adat, syarak, dan masyarakat serta menjadi mekanisme sosial dalam menilai kelayakan seorang pemimpin. Pada era modernisasi, makna kepatutan bergeser menuju integritas, kompetensi, dan tanggung jawab sosial tanpa meninggalkan landasan etis adat sebagai kerangka kepemimpinan Melayu kontemporer. Temuan ini menegaskan relevansi *Orang Patut* sebagai kerangka etika kepemimpinan Melayu kontemporer.

Kata Kunci: orang patut, identitas, kekuasaan, kepemimpinan Melayu

Abstrac

This research aims to examine the concept of proper people in Malay society which focuses on the formation of social hierarchy and leadership. The data in this study is in the form of classic texts of Malay Teaching on the concept of leadership, morality, and legitimacy of power. This research is a literature study research with a qualitative descriptive approach. The results of the study show that Orang Patut is understood as a respected figure because of his nobility, wisdom, ability to weigh problems, and a good understanding of customs and religion. Orang Patut functions as a symbolic capital that maintains harmony between customs, syarak, and society and becomes a social mechanism in assessing the feasibility of a leader. In the era of modernization, the meaning of propriety shifted towards integrity, competence, and social responsibility without abandoning the traditional ethical foundation as the framework of contemporary Malay leadership. These findings confirm the relevance of Orang Patut as an ethical framework for contemporary Malay leadership.

Keywords: worthy people, identity, power, Malay leadership

Pendahuluan

Dalam tradisi masyarakat Melayu, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan politik, garis keturunan ataupun jabatan formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral dan kemanusiaan yang berakar kuat pada adat. Salah satu konsep penting yang menandai pandangan tersebut adalah istilah "*Orang Patut*". *Orang Patut* adalah tokoh adat yang dituakan, dijadikan rujukan moral dan juga pemimpin bagi masyarakat

Melayu. Tenas Effendy (2004) dalam buku *Tunjuk Ajar Melayu* menyatakan *Orang Patut* itu bukan tinggi suaranya, melainkan tinggi timbangannya. Ungkapan tersebut bermakna kualitas *Orang Patut* tidak diukur dari kerasnya suara ataupun kemampuan menunjukkan kuasa, melainkan dari kebijakan dalam menimbang suatu persoalan, kehati-hatian dalam berucap, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. “Tinggi timbangan” merujuk pada kapasitas moral dan intelektual yang dimiliki untuk mempertimbangkan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, serta akibat dari setiap tindakan. Dengan demikian, ungkapan ini memosisikan *Orang Patut* sebagai figur yang dihormati karena ketenangan, ketelitian, serta keluhuran budinya.

Dalam sistem sosial Melayu, *Orang Patut* memiliki peran yang penting dalam berbagai hal dalam ranah budaya seperti dalam acara pernikahan, penyelesaian sengketa, mendamaikan perkelahian, sunat rasul, acara adat, pengobatan, dan lainnya (Amanan et al., 2021). *Orang Patut* adalah tokoh adat yang dituakan, dijadikan rujukan moral dan juga pemimpin. Hal tersebut selaras dengan pendapat bahwa dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin yang baik adalah sosok yang dituakan oleh masyarakat itu sendiri (Andriani et al., n.d.). *Orang Patut* tidak hanya bermakna orang yang layak atau pantas, namun juga merujuk pada individu yang memiliki budi pekerti, kebijaksanaan, pengetahuan agama, dan kehormatan yang tinggi. Bagi masyarakat Melayu tradisional, kepatutan seseorang sering kali menentukan sejauh mana dihormati, diikuti, dan diberi ruang untuk memimpin. *Orang Patut* menjadi kategori sosial yang menghubungkan identitas, moralitas, dan legitimasi kekuasaan.

Konsep *Orang Patut* merepresentasikan konstruksi sosial tentang pemimpin ideal yang tidak hanya diukur dari garis keturunan, tetapi juga dari keutuhan akal budi dan marwah. Dalam kerangka adat Melayu, nilai-nilai seperti *budi*, *akal*, dan *malu* menjadi dasar pembentukan watak pemimpin yang patut diteladani. Prinsip ini berpijak pada falsafah adat yang berbunyi “*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*”, yang menunjukkan hubungan erat antara adat, agama, dan etika kepemimpinan. Oleh karena itu, kepemimpinan Melayu tradisional dapat dipahami sebagai medan tempat identitas moral dan politik dipertemukan, di mana kekuasaan dilegitimasi bukan hanya oleh keturunan, melainkan juga oleh kepatutan yang diakui masyarakat (Endrizal & Hendri, 2018).

Dalam kehidupan modern, makna *Orang patut* mengalami dinamika seiring perubahan sosial dan politik. Modernisasi, pendidikan, dan birokratisasi telah menggeser kriteria kepatutan dari yang berbasis keturunan menuju aspek kompetensi, moralitas, dan tanggung jawab sosial. Namun, pemahaman mendalam mengenai konstruksi “kepatutan” sebagai landasan identitas dan kekuasaan dalam kepemimpinan Melayu belum terjelaskan secara sistematis dalam penelitian sebelumnya. Sejumlah kajian terdahulu lebih menekankan struktur genealogis, sejarah kerajaan, atau hierarki adat, dan belum banyak menguraikan nilai, simbol, dan praktik budaya membentuk identitas pemimpin patut. Selain itu, hubungan antara konsep orang patut dengan mekanisme legitimasi kekuasaan dalam masyarakat Melayu modern juga belum banyak dibahas. Dinamika modernisasi politik, sistem pendidikan, dan birokratisasi menghasilkan perubahan pada praktik kepemimpinan, namun belum sepenuhnya dijelaskan dalam literatur ilmiah bagaimana perubahan tersebut memengaruhi konstruksi nilai kepatutan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji *Orang Patut* sebagai konsep yang bukan hanya mencerminkan nilai budaya, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menentukan kelayakan seseorang untuk memimpin. Penelitian berjudul “*Orang Patut: Konstruksi Identitas dan Kekuasaan dalam Kepemimpinan Melayu*

Tradisional” disusun untuk menjelaskan bagaimana konsep orang patut dibentuk, diwariskan, dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Melalui analisis budaya dan wacana, penelitian ini menelaah nilai-nilai kepatutan menjadi dasar legitimasi dan otoritas pemimpin, serta bagaimana konsep tersebut bertransformasi seiring perkembangan kehidupan modern. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara identitas, moralitas, dan kekuasaan dalam tradisi kepemimpinan Melayu, sekaligus menunjukkan kontinuitas nilai adat dalam menghadapi perubahan zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini berfokus pada pendeskripsian data secara mendalam, rinci, dan menyeluruh agar mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara utuh. Data dalam penelitian ini berupa teks klasik *Tunjuk Ajar Melayu* tentang konsep kepemimpinan, moralitas, dan legitimasi kekuasaan. Selain itu, penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan teknik penelaahan pada berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, catatan, serta laporan yang relevan dengan topik penelitian (Nazir, 2013). Dengan demikian, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan, melainkan mengandalkan analisis terhadap literatur yang sudah ada untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik yang dikaji.

Hasil

Makna dan Fungsi Sosial Konsep *Orang Patut*

Konsep *Orang Patut* tidak hanya sekedar merujuk pada seseorang yang “layak” atau “pantas”, tetapi mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual. Dalam tradisi Melayu, *Orang Patut* merujuk pada individu yang memiliki keluhuran budi, kebijaksanaan, pengetahuan agama, dan kemampuan menjaga marwah diri serta masyarakat. Nilai ini tercermin dalam ungkapan petatah petiti adat Melayu lama dalam teks klasik *Tunjuk Ajar Melayu*, yakni “*tinggi ilmu karena budi, besar nama karena akal*”, yang menegaskan bahwa kelayakan seseorang diukur melalui akal dan adab, bukan semata keturunan atau kekayaan. Sistem kepemimpinan Melayu, seorang pemimpin harus “patut” tidak hanya dalam sikap lahiriah, tetapi juga dalam moral batiniah, sebab kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab sosial dan spiritual (Saimon & Rashid, 2022). Kepatutan tidak hanya ditentukan oleh status sosial, tetapi oleh kualitas moral yang diakui secara kolektif.

Dari perspektif sosial, *Orang Patut* dipahami sebagai orang yang memiliki kemampuan memecahkan persoalan, menjadi rujukan bagi masyarakat, serta dihormati karena kompetensi dan keteladan perilakunya (Saputra et al., 1996). *Orang Patut* bertugas dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di keluarga ataupun masyarakat. *Orang patut* sangat dihormati oleh masyarakat, namun dalam tradisi Melayu tidak mengajarkan orang-orang untuk menghormati secara berlebihan. Masyarakat Melayu memandang bahwa semua manusia pada dasarnya setara. Selaras dengan ungkapan dari teks klasik *Tujuk Ajar Melayu*, yakni “*Jika tinggi hendaklah merendah, jika besar hendaklah mengalah*” yang memiliki makna bahwa seorang pemimpin tetap harus memiliki prinsip setara martabatnya dalam masyarakat Melayu. Orang yang mampu hendaknya membimbing dan membantu yang kurang, sementara yang kurang menghormati kemampuan orang lain sebagai bentuk etika sosial.

Sikap pengabdian dan kerelaan berkhidmat menjadi elemen yang menonjol dalam karakter *Orang Patut*. Selain itu, bersedia meluangkan waktu kapan pun dibutuhkan, karena kemampuan yang dimilikinya dipahami sebagai amanah dan anugerah dari Tuhan. *Orang Patut* menjalankan perannya dengan tulus, mengutamakan kepentingan bersama, dan hadir untuk menolong siapa pun yang memerlukan (Beden, 2023). Kemampuan dan kepakaran yang dimiliki *Orang Patut* dipahami sebagai amanah yang harus digunakan demi kemaslahatan bersama. Konsep *Orang Patut* memiliki signifikansi epistemologis dan sosial dalam sistem kepemimpinan Melayu. Hal tersebut berfungsi sebagai dasar legitimasi kepemimpinan, sebagai pedoman etika sosial, sekaligus sebagai mekanisme budaya untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat.

Konstruksi Identitas dan Legitimasi Kekuasaan

Konsep *Orang Patut* berperan penting dalam membentuk identitas sosial dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat Melayu. Dalam struktur adat, masyarakat adat Melayu melantik pemimpin berdasarkan pengakuan atau kelayakan (kepatutan), bukan garis keturunan. Seseorang dianggap *orang patut* jika memiliki akal, moral (budi), harga diri (marwah), dan agama yang baik. Hal tersebut merupakan empat pilar utama kepatutan legitimasi atau kepatutan pemimpin Melayu (Effendy, 2013). Legitimasi kekuasaan *orang patut* muncul secara alami dari rasa hormat masyarakat, bukan paksaan. Tugas utama *orang patut* menjadi teladan dan penengah yang bijak dalam menjaga harmoni antara tradisi dan agama, serta menjadikannya simbol kepemimpinan yang terhormat.

Dalam struktur adat Melayu, legitimasi kekuasaan bersifat non-koersif. Kekuasaan tidak lahir dari paksaan atau dominasi fisik, tetapi tumbuh dari pengakuan sosial dan moral yang diberikan oleh masyarakat. Penghulu atau tetua adat dianggap layak dihormati bukan karena posisi formal semata, melainkan karena rekam jejaknya dalam menegakkan keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Reputasi moral menjadi modal utama yang memperkuat kedudukan seorang pemimpin, sehingga identitas sebagai *Orang Patut* tidak hanya melekat sebagai gelar adat, tetapi menjadi simbol kehormatan dan kepercayaan kolektif.

Identitas orang patut dibangun melalui praktik budaya, seperti ritual adat, pakaian simbolis, gelar, kepemilikan pusaka, peran dalam upacara, dan sejarah (Sularti, 2024). Identitas tersebut tidak hanya dihasilkan pada tingkat simbolik, tetapi juga diwariskan dan direproduksi lintas generasi melalui peninggalan sastra Melayu seperti hikayat, pantun, dan peribahasa yang memuat nilai kepemimpinan ideal, serta melalui peran lembaga adat, pendidikan informal, dan praktik sosial sehari-hari yang terus menanamkan norma tentang siapa yang dianggap patut dalam masyarakat. Dalam konteks konstruksi identitas dan legitimasi kekuasaan, rangkaian praktik tersebut tidak hanya membentuk citra “orang patut” sebagai figur ideal, tetapi juga menjadi sumber pembenaran sosial bagi otoritas yang mereka miliki. Dengan kata lain, identitas budaya yang dilembagakan itulah yang menyediakan dasar moral, historis, dan simbolik bagi orang patut untuk diakui, dihormati, dan diterima sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat Melayu tradisional.

Semakin tinggi kualitas kepatutan seseorang, semakin kuat pula legitimasi kekuasaannya dalam tatanan sosial Melayu. Artinya integritas, kejujuran, dan penghormatan terhadap adat istiadat, semakin besar pula dukungan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Masyarakat Melayu menganggap tingkat kepatuhan seseorang berarti bertindak sesuai dengan norma, etika, dan nilai budaya yang langsung memengaruhi seberapa kuat legitimasi kekuasaannya. Identitas seseorang sebagai

orang patut (orang yang berbudi luhur) secara langsung mendukung kekuasaannya. Selain itu, pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan di bidang yang dipimpinnya. Masyarakat Melayu lebih menghargai pemimpin yang berintelektual dibandingkan pemimpin yang hanya mengandalkan kekuasaan (Thamrin, 2018). Pemimpin digambarkan sebagai sosok yang “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting”. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa pemimpin sepatutnya memiliki moral dan spiritual yang lebih baik dibandingkan orang yang dipimpinnya.

Orang Patut sebagai Representasi Kekuasaan Simbolik

Kekuasaan simbolik merujuk pada kemampuan seseorang untuk memperoleh pengaruh dan hasil yang setara dengan apa yang biasanya dicapai melalui kekuatan fisik maupun kekuasaan ekonomi, namun dicapai melalui pengakuan sosial dan jaringan modal sosial (Haerussaleh & Huda, 2021). Modal simbolik sendiri merupakan bentuk sumber daya seperti kehormatan, reputasi, status, atau legitimasi budaya yang dapat dimaksimalkan untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan simbolik tersebut. Sebuah simbol memiliki daya konstruktif kuat yang mampu membentuk cara pandang, menumbuhkan kepercayaan, serta mengarahkan persepsi individu maupun kelompok terhadap realitas sosial. Kekuasaan simbolik bekerja melalui makna, citra, dan legitimasi yang diterima bersama, bukan melalui paksaan langsung.

Dari perspektif teori kekuasaan simbolik Haerussaleh dan Huda, *Orang Patut* dapat dipahami sebagai figur yang memiliki modal simbolik, yakni pengakuan dan kehormatan sosial yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Kekuasaan seorang pemimpin Melayu bukan sekedar hasil dari struktur politik, melainkan juga hasil dari internalisasi nilai-nilai budaya yang menegaskan otoritas moralnya (Endrizal & Hendri, 2018). Dalam hal ini, kepemimpinan Melayu bersifat representasional, dimana seorang *Orang Patut* mewakili nilai-nilai luhur yang dimiliki masyarakatnya. *Orang Patut* menjadi perantara antara adat, syariat, dan rakyat. Struktur kepemimpinan seperti ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam budaya Melayu dijaga oleh norma adat dan diatur oleh nilai kepatutan.

Eksistensi *Orang Patut* sebagai perwujudan nilai-nilai adat sekaligus berperan sebagai jembatan antara hukum agama (syarak) dan tradisi. *Orang Patut* menjadi acuan utama bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang pantas. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat Melayu tidak hanya bersandar pada kekuatan politik, melainkan juga pada nilai-nilai budaya. Kepemimpinan ini bersifat dua arah, yakni pemimpin tidak hanya memerintah, tetapi perilakunya juga diawasi oleh aturan adat untuk menjaga etika kepemimpinan.

Relevansi Konsep *Orang Patut* dalam Konteks Modern

Perubahan sosial, politik, dan pendidikan di dunia Melayu telah memengaruhi cara masyarakat menilai kepatutan. Jika pada masa lampau kepemimpinan diwariskan berdasarkan keturunan dan pengakuan adat, maka pada masa kini kepatutan lebih banyak dikaitkan dengan integritas moral, kemampuan intelektual, dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, nilai dasar dari *Orang Patut* tetap bertahan, yakni bahwa kekuasaan harus berlandaskan budi dan adab. Prinsip ini masih tercermin dalam ungkapan modern seperti “*pemimpin yang beradab*” atau “*pemimpin yang berjiwa Melayu*”, yang menandakan kesinambungan nilai-nilai adat dalam membentuk etika kepemimpinan. Dengan demikian, *Orang Patut* tidak hanya menjadi konsep budaya masa lalu, tetapi juga cermin moral yang relevan bagi kepemimpinan kontemporer.

Di era sekarang, konsep *Orang Patut* bertransformasi menjadi panduan etis bagi kepemimpinan modern. Panduan etis memberikan perbaikan terhadap kekuasaan yang

sering kali didominasi oleh kepentingan politik atau pragmatis. Ungkapan seperti “pemimpin yang beradab” atau “pemimpin yang menjaga marwah” menunjukkan bahwa nilai kepatutan tetap menjadi standar moral dalam menilai kualitas pemimpin, baik dalam konteks adat, pemerintahan, maupun organisasi sosial. *Orang Patut* tidak hanya warisan budaya, melainkan sumber inspirasi praktis untuk organisasi sosial, pemerintahan, dan adat, memastikan pemimpin bertindak secara etis dan bertanggung jawab.

Simpulan

Konsep *Orang Patut* dalam tradisi Melayu merupakan konstruksi budaya yang menempatkan moralitas, kebijaksanaan, dan keluhuran budi sebagai pondasi utama kepemimpinan. Istilah tersebut bukan hanya sekedar merujuk pada seseorang yang layak secara sosial, tetapi juga mencerminkan integritas, ketenangan, kemampuan menimbang persoalan, serta kecerdasan akal dan adab. Identitas *Orang Patut* melalui nilai budi, akal, agama, dan marwah yang berkar kuat dalam sistem adat. Identitas tersebut kemudian diimplementasikan melalui praktik budaya, ritual adat, serta karya sastra sehingga menjadi legitimasi kekuasaan yang bersifat simbolik. Di era modern, *Orang Patut* mengalami transformasi namun tidak kehilangan relevansinya. *Orang Patut* berhubungan dengan kompetensi integritas serta tanggung jawab etis seorang pemimpin. Nilai-nilai dasar seperti adab, marwah, kebijaksanaan, dan akal budi tetap menjadi pedoman dalam menilai kualitas kepemimpinan. Dengan demikian, *Orang Patut* berfungsi sebagai jembatan antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas sekaligus menjadi pedoman yang dapat menuntun pemimpin untuk bertindak bijaksana, beradab, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi etnografi atau wawancara mendalam dengan narasumber seperti tokoh adat, pemimpin lokal, atau masyarakat Melayu. Peneliti selanjutnya juga dapat mengkaji perbandingan antara konsep *Orang Patut* dan model kepemimpinan tradisional pada etnis lain di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Amanan, Hermansyah, & Juswandi. (2021). *Pengenalan Orang Patut dalam Tradisi Melayu Riau Pada Siswa di SMP Negeri 3 Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. 1(2).
<https://doi.org/https://journal.unilak.ac.id/index.php/bidik/article/view/6394/2963>
- Andriani, F., Rahman, E., & Rumadi, H. (n.d.). *MALAY LEADER IN CHARACTER EXPRESSIONS WORKS*. 1–15.
- Beden, D. S. (2023). *Dimensi Pentadbiran Kepimpinan Dalam Hikayat Panglima Nikosa dari Perspektif Pendekatan Pengurusan Dr*. 1(3), 1–15.
- Effendy, T. (2006). *Tunjuk Ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Effendy, T. (2013). *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-Butir Budaya Melayu Riau)*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.
- Endrizal, & Hendri, N. (2018). Politik Identitas: Konstruksi Sosial dan Relasi Kekuasaan. *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, 4(1).
- Haerussaleh, H., & Huda, N. (2021). Modal Sosial, Kultural, Dan Simbolik Sebagai Representasi Pelanggaran Kekuasaan Dalam Novel the President Karya

- Mohammad Sobary (Kajian Pierre Bourdieu). *Metalingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 19–28.
<https://doi.org/10.21107/metalingua.v6i1.10032>
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Saimon, A., & Rashid, M. A. (2022). *Konsep Kepimpinan dalam Peribahasa Melayu : Analisis Semantik Inkuisitif Leadership Concepts in Malay Proverbs : An Inquisitive Semantic Analysis*. 12(1), 6–17.
- Saputra, S. De, Harsono, T. D., Nuh, M. I., Setiati, D., & Zakbah. (1996). *Persepsi Tentang Etos Kerja: Kaitannya dengan Nilai Budaya Masyarakat Melayu Daerah Riau (Kasus Kelurahan Pesisir Kotamadya Pekanbaru)* (Yussuwadinata (ed.)). Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai--Nilai Budaya Riau.
- Sularti, D. S. (2024). Representasi Makna Ragam Hias pada Rumah Adat Selaso Jatuh Kembar Riau (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Sindoro: Cendekia Pendidikan*, 3, 45–68.
- Thamrin, H. (2018). *Antropologi Melayu*. Kalimedia.